



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Veteran No. 153 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 8641149 email. kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

Nomor : 800/Kep.10-Kesbangpol/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

**PETA PROSES BISNIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diperlukan penataan ketatalaksanaan;
- b. Bahwa agar penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana, berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun peta proses bisnis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Peta Proses Bisnis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4927) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

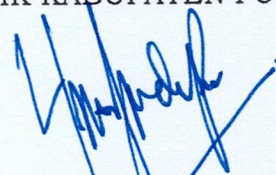
: Menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, maka akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2024

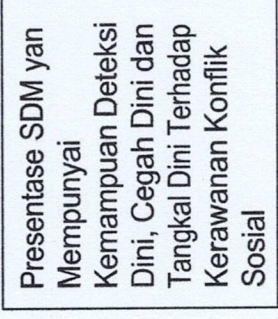
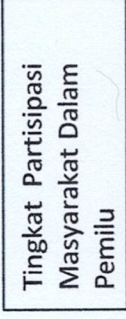
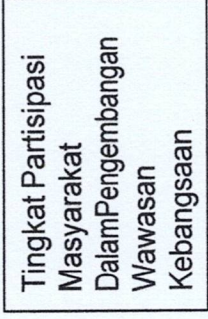
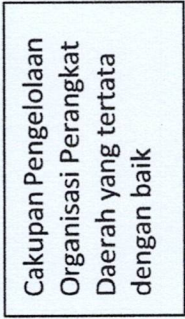
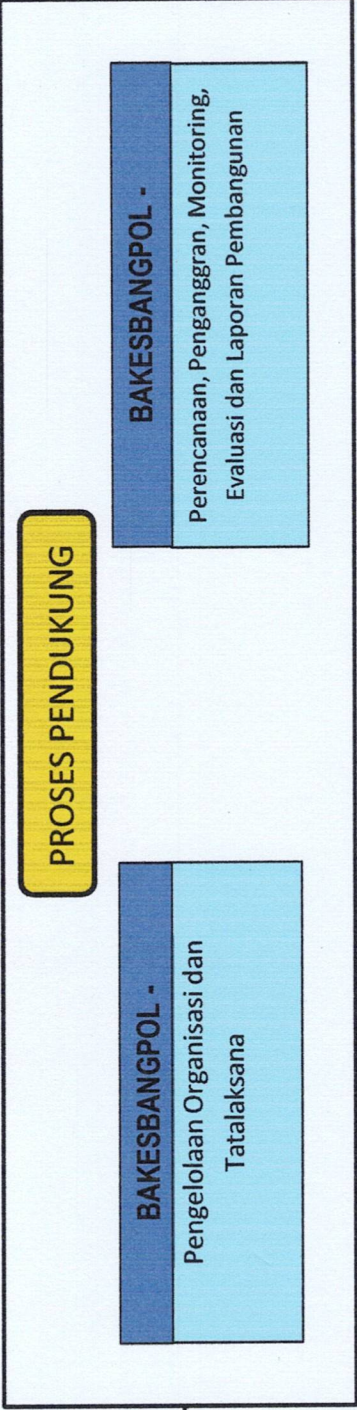
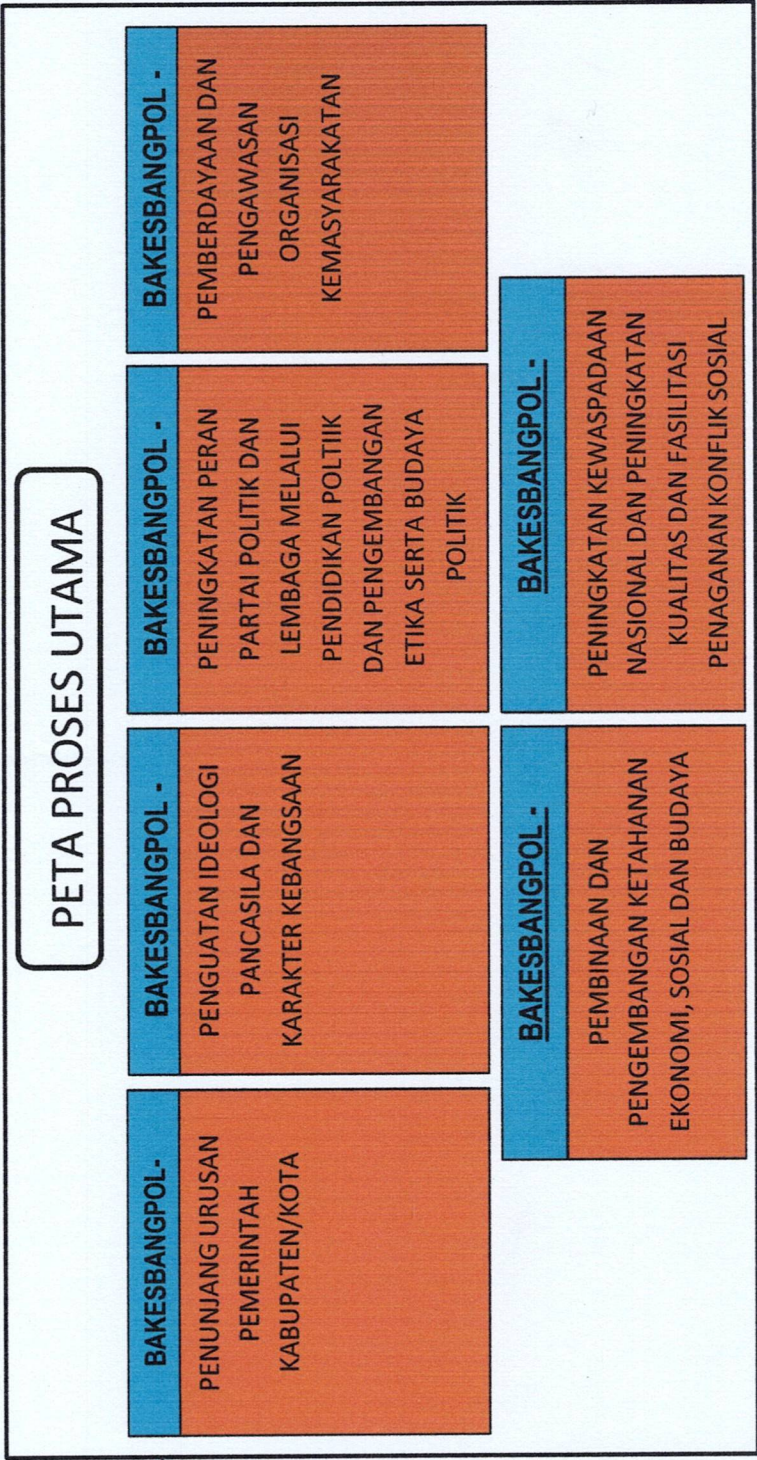
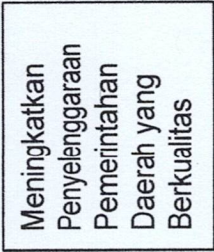
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA**



YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP., M.Si

Gol. IV.a / Pembina

NIP. 19790402 199810 1 001

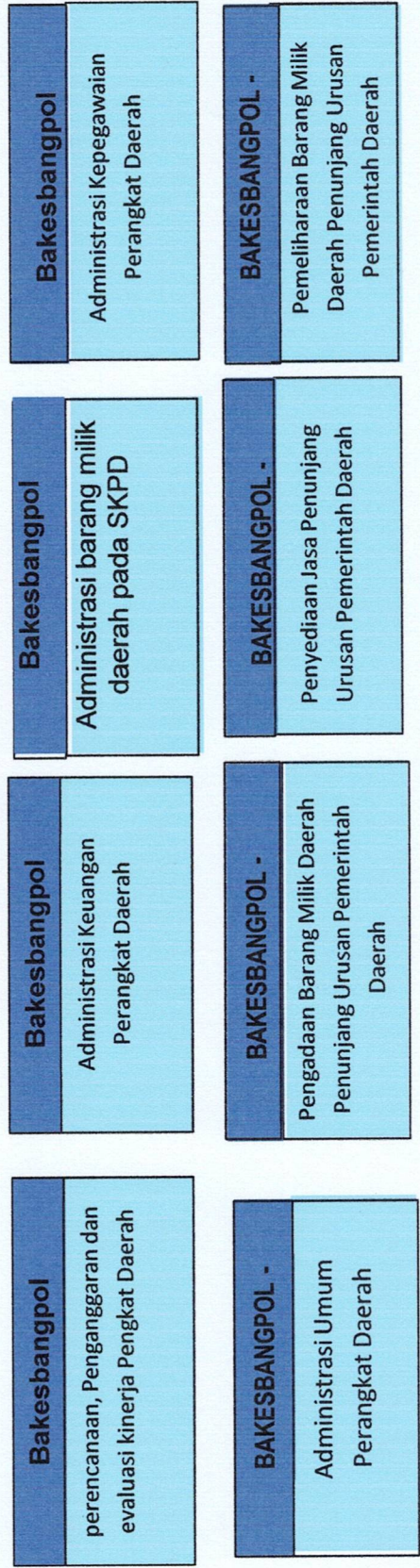


OUTPUT

PETA SUB PROSES

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

BAKESBANGPOL -16.01
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA



- Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah
- Persentase Dokumen Perencanaan, & Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu
- Presentasi Pelaporan Keuangan Tepat Waktu
- Persentase aparatur yang berkinerja baik
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja
- Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

INPUT

INPUT

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -
PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

BAKESBANGPOL -
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

OUTPUT

Presentase Pembinaan
Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan
Bagi Masyarakat

INPUT

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -

PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA MELALUI
PENDIDIKAN POLTIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

BAKESBANGPOL -

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Pewakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik

OUTPUT

Persentase Partisipasi
Pemilih Dalam Pemilu dan
Pilkada Dikabupaten
Pesisir Barat

INPUT

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -

PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

BAKESBANGPOL -

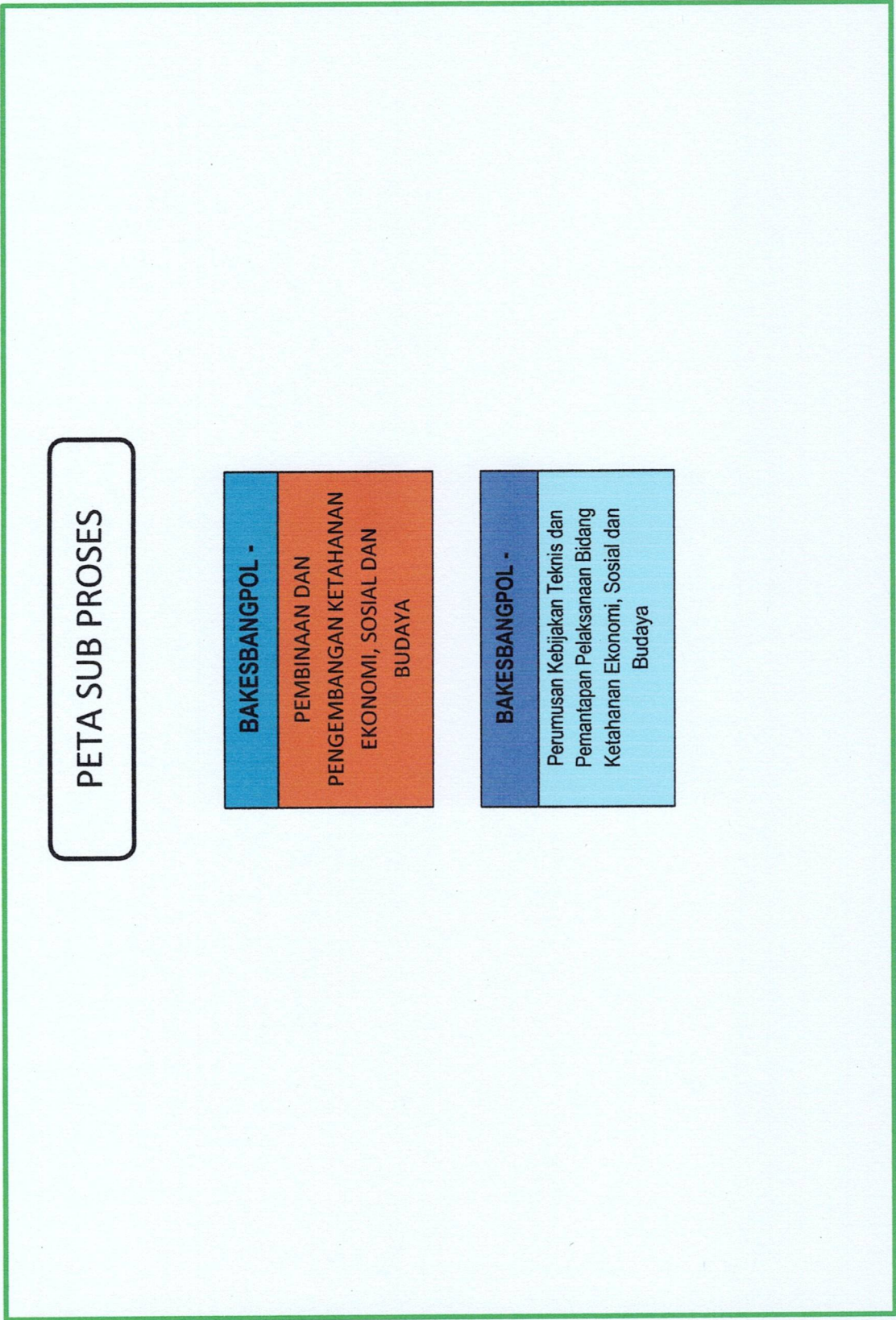
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemanfaatan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Masyarakat

OUTPUT

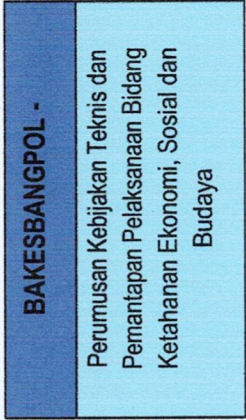
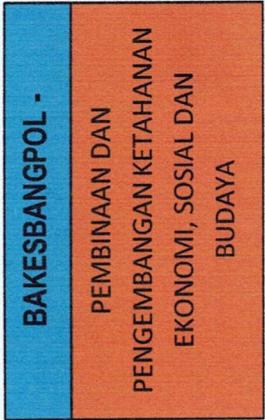
Persentase Organisasi
Masyarakat yang Aktif di
Kabupaten Purwakarta



Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas



PETA SUB PROSES



Persentase Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya

INPUT

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -

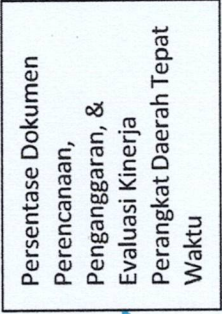
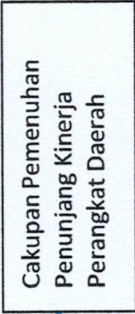
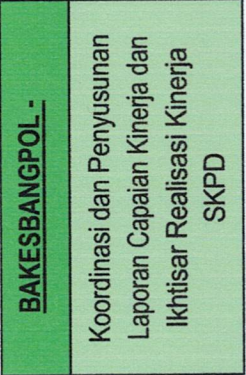
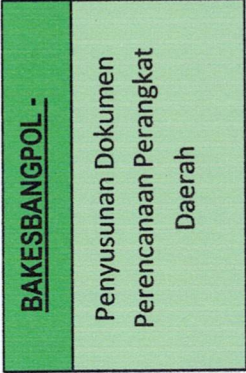
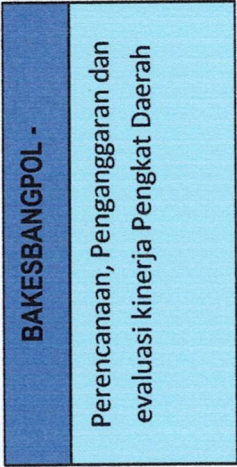
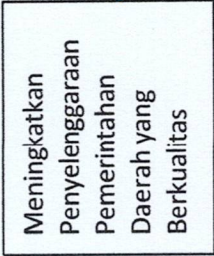
PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENAGANAN KONFLIK SOSIAL

BAKESBANGPOL -

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

OUTPUT

Persentase Koordinasi dan
Peran Lembaga dan Elemen
Masyarakat dalam
Pencegahan Terjadinya
Konflik Sosial di Kabupaten
Purwakarta





Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

BAKESBANGPOL -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

BAKESBANGPOL -
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD



Persentase
Pelaporan
Keuangan Tepat
Waktu

INPUT

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

BAKESBANGPOL -

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

BAKESBANGPOL -

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

BAKESBANGPOL -

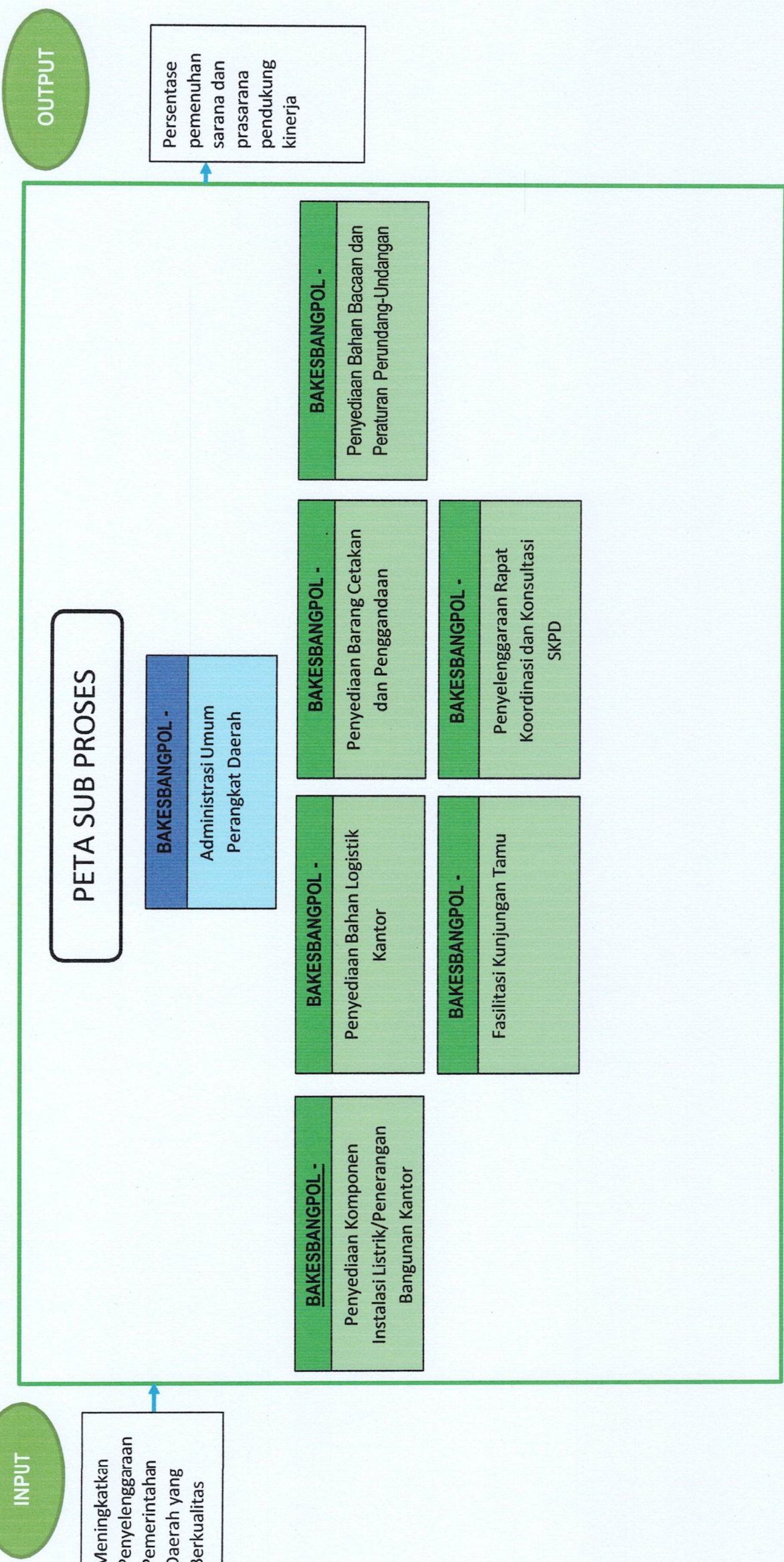
Monitoring, Evaluasi dan
Penilaian Kinerja Pegawai

BAKESBANGPOL -

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

OUTPUT

Persentase
aparatur yg
berkinerja baik

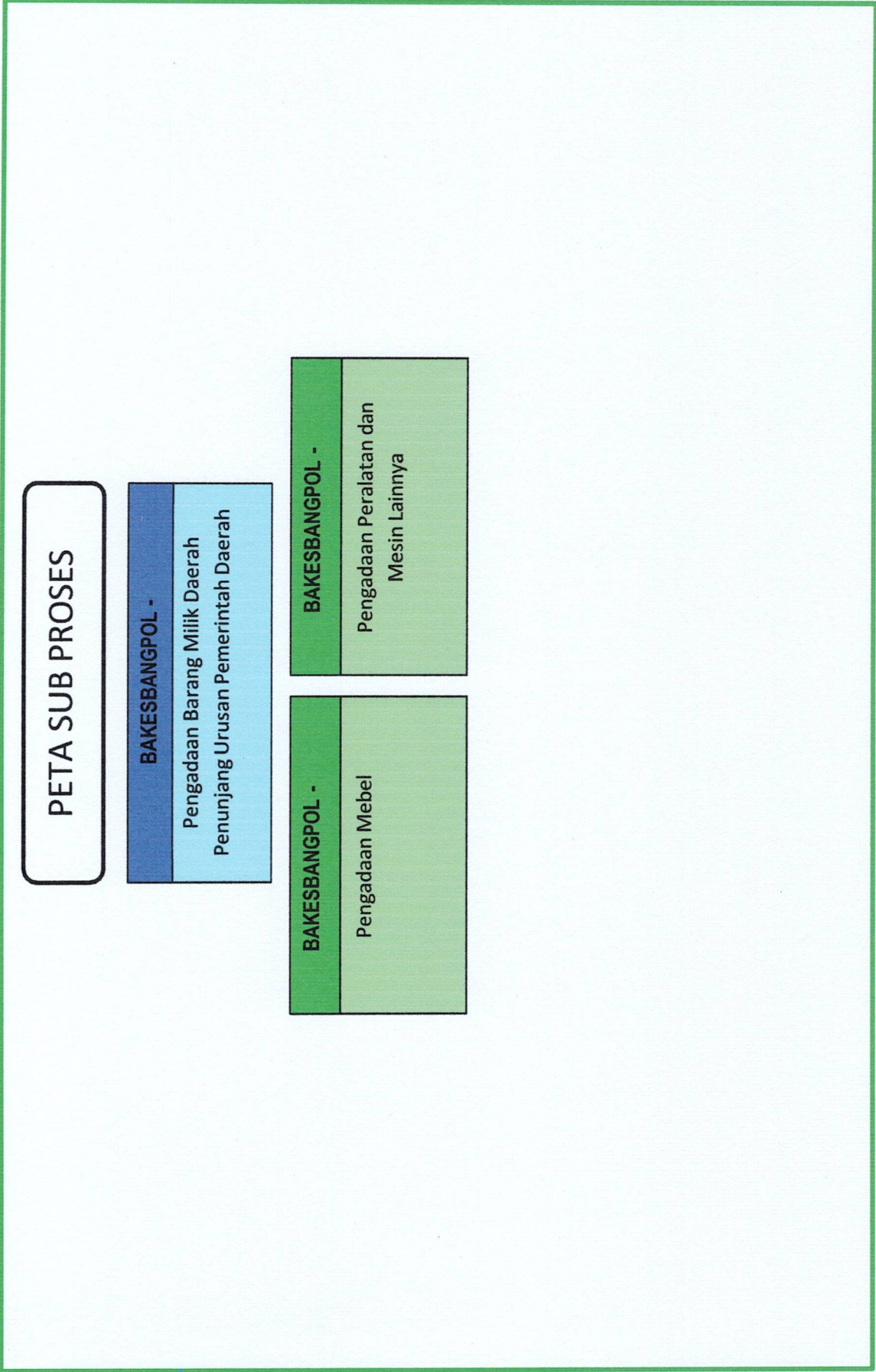




Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas



Persentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
pendukung
kinerja

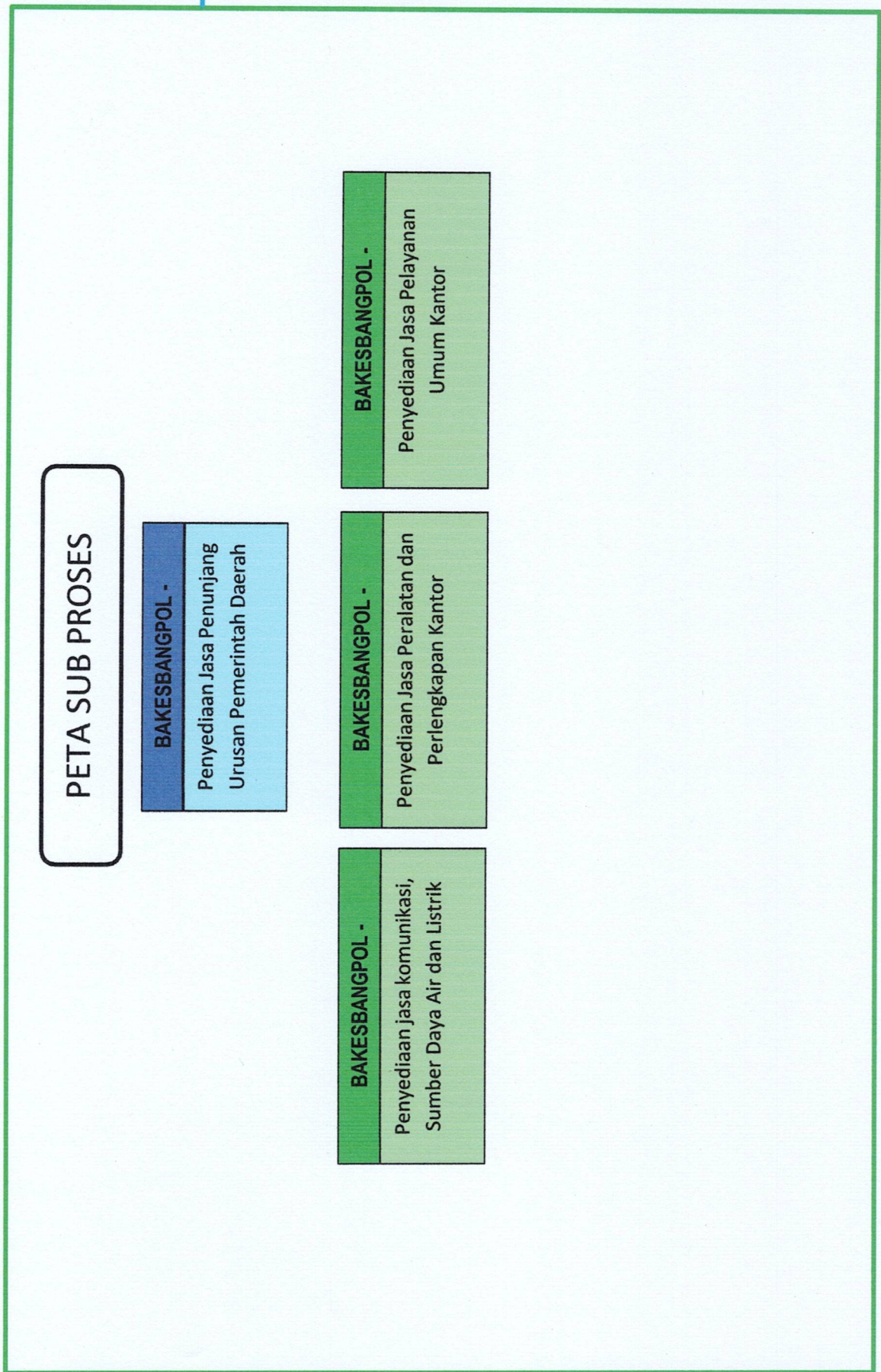


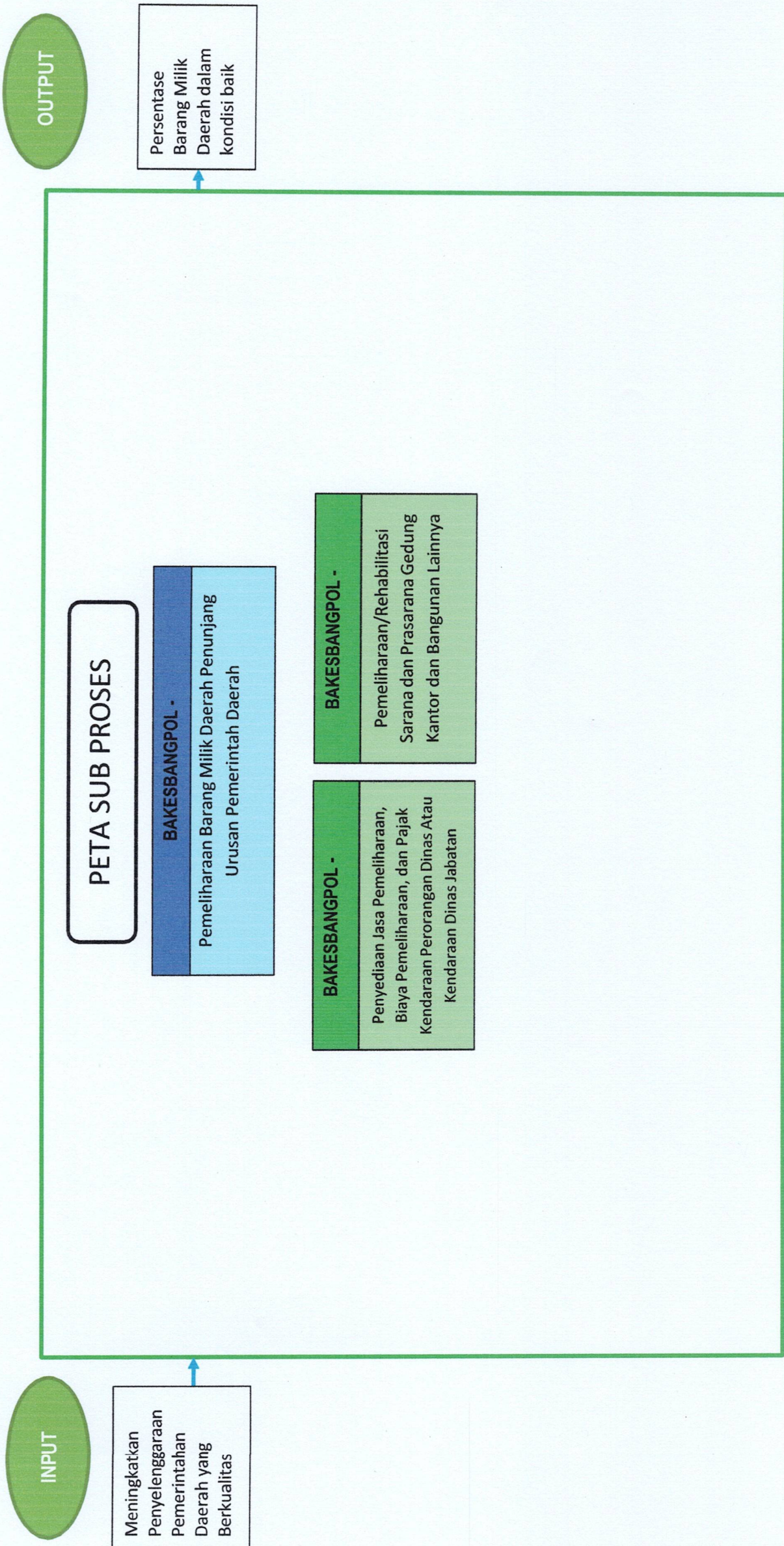


Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas



Persentase
pemuhanan
Layanan
Pendukung





INPUT

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan

BAKESBANGPOL -

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

BAKESBANGPOL -

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

OUTPUT

Presentase
Pelaksanaan
Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang Ideologi
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan



Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

BAKESBANGPOL -

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

BAKESBANGPOL -

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

BAKESBANGPOL -

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik



Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik



Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

BAKESBANGPOL -
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

BAKESBANGPOL -
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat



Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

PETA SUB PROSES

BAKESBANGPOL -
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

BAKESBANGPOL -
Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitas
Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitas Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

BAKESBANGPOL -
Pelaksanaan Koordinasi
dibidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitas
Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitas Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah



Persentase
Pemantapan
Pelaksanaan
Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya

PETA SUB PROSES

INPUT

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

BAKESBANGPOL -

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Bidang
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

BAKESBANGPOL -

Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta penanganan
konflik daerah

BAKESBANGPOL -

Pelaksanaan Koordinasi dibidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Pebratasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta penanganan
konflik daerah

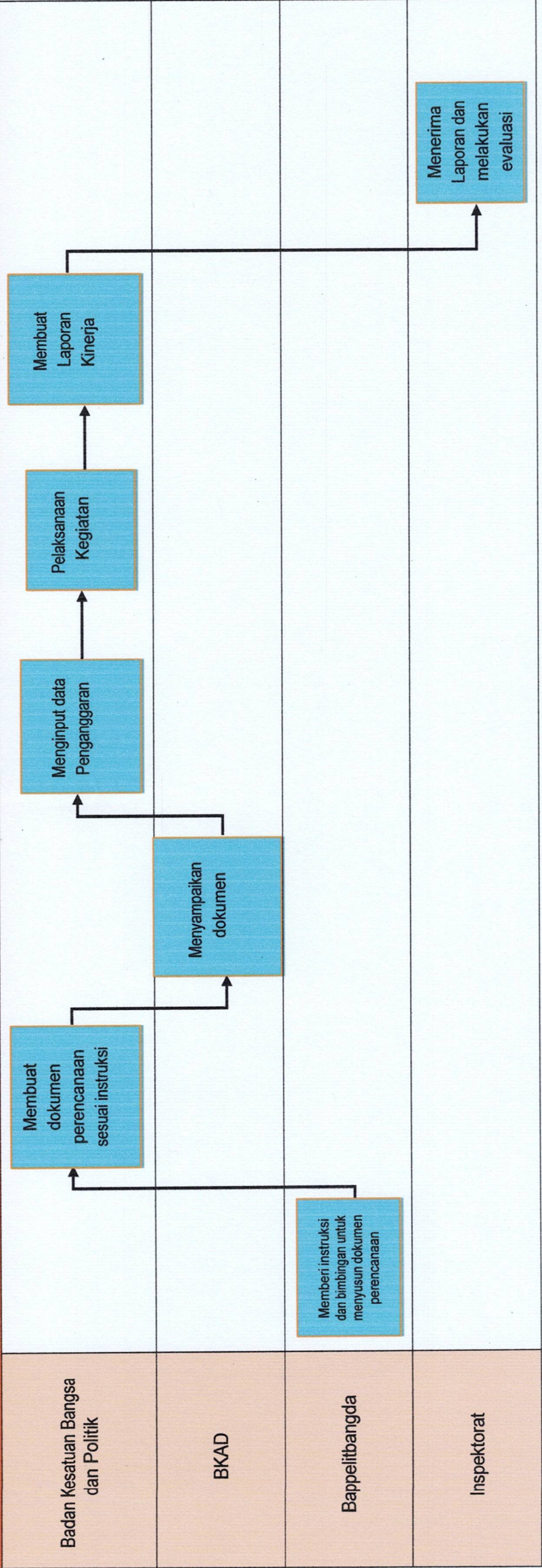
BAKESBANGPOL -

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
serta penanganan konflik daerah

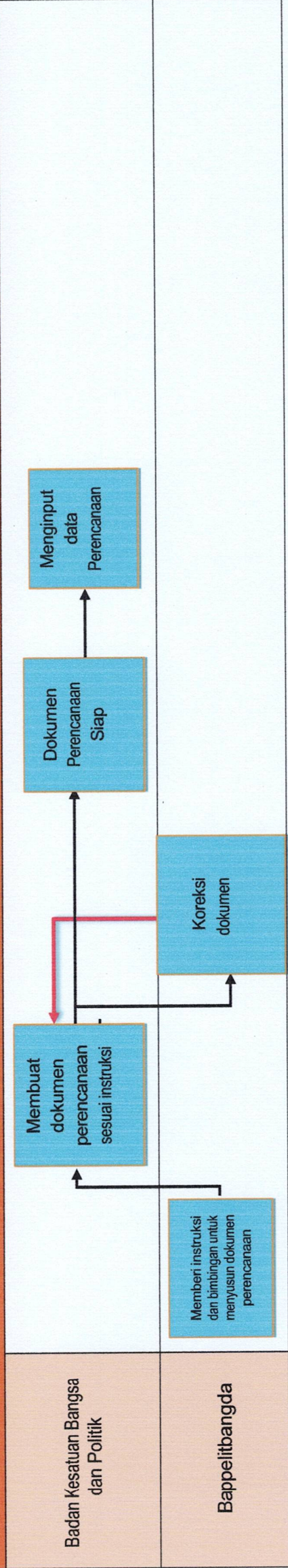
OUTPUT

Persentase
Koordinasi,
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial

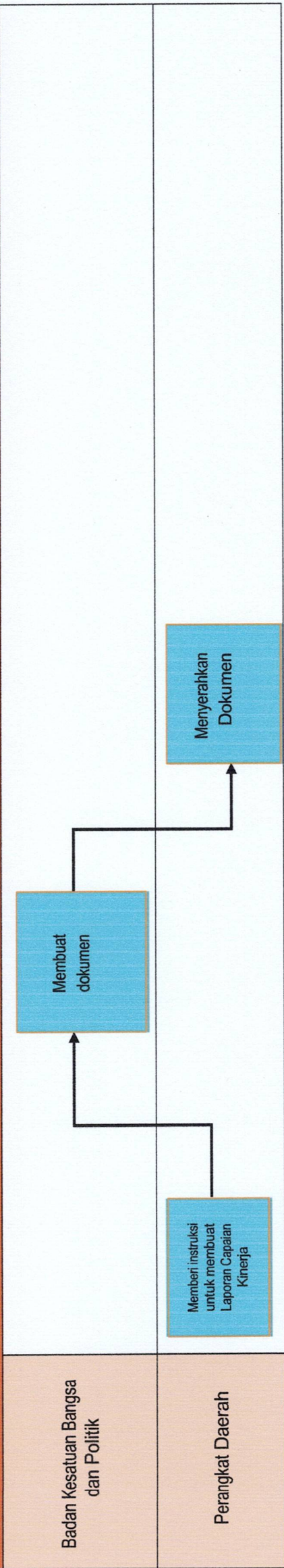
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Pengkat Daerah
BAKESBANGPOL-



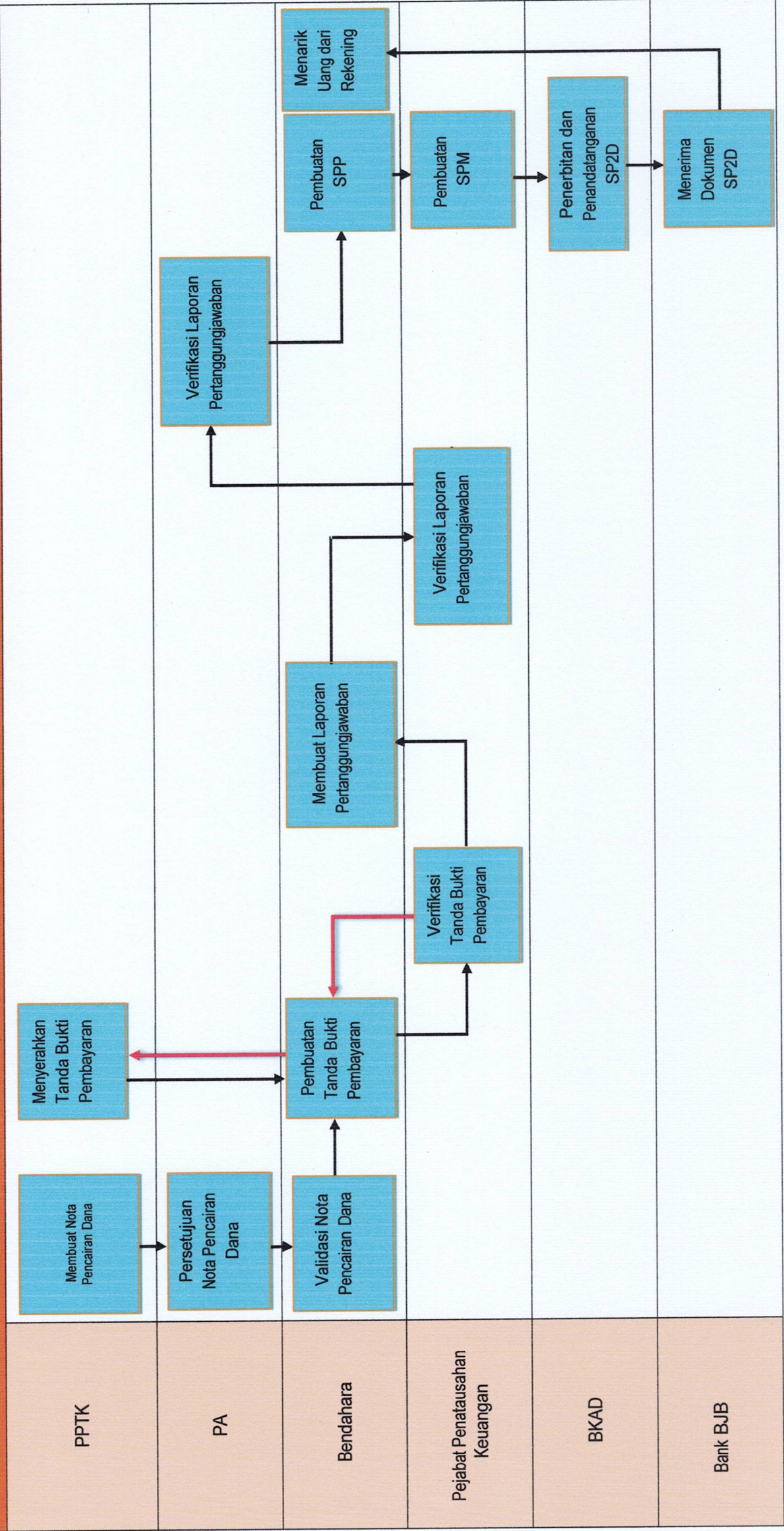
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
BAKESBANGPOL-



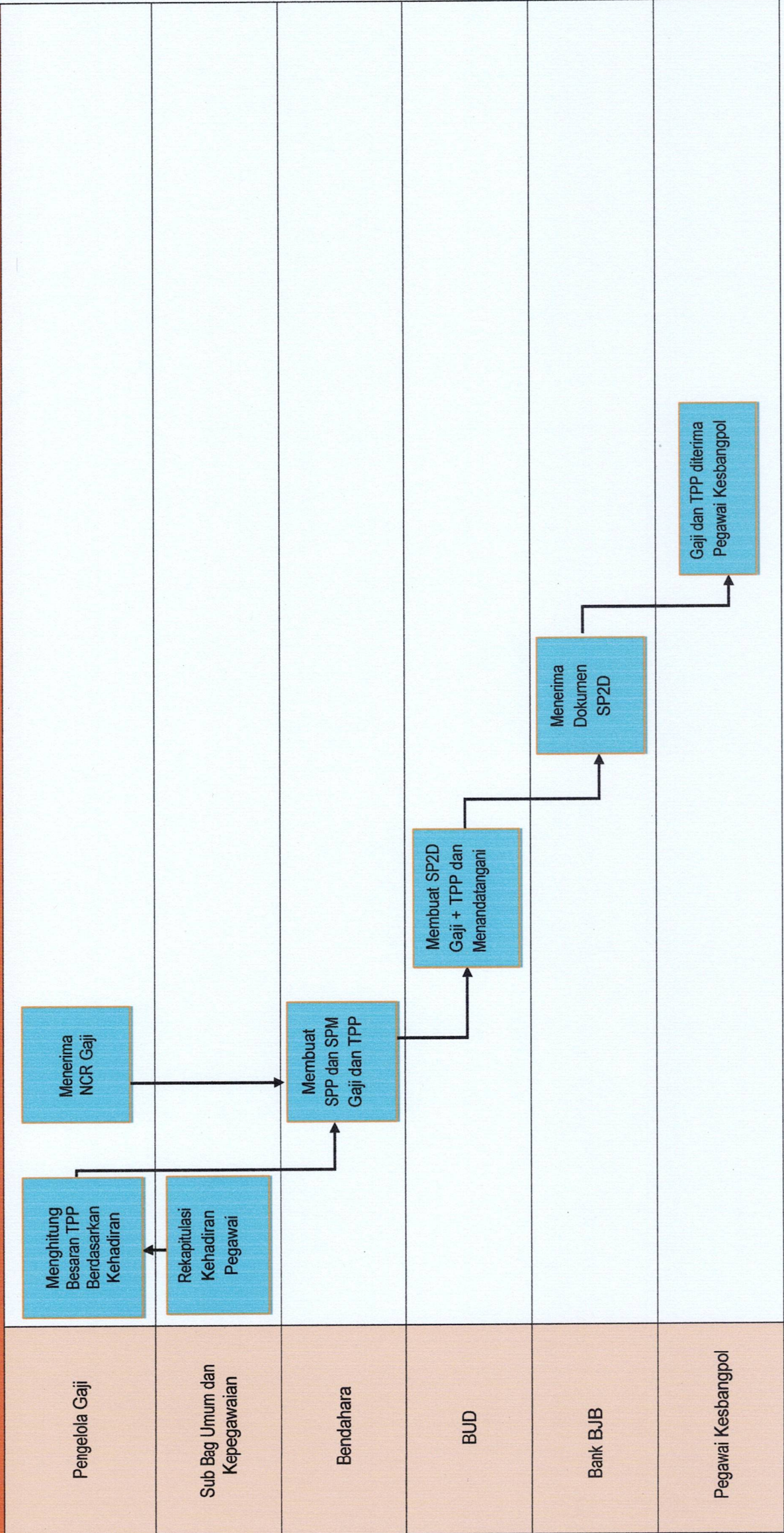
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
BAKESBANGPOL-



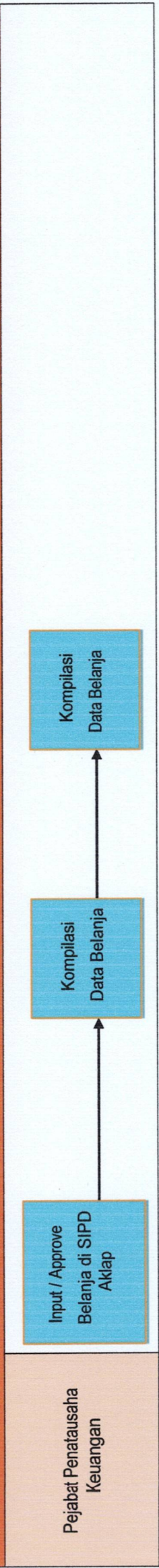
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
BAKESBANGPOL-



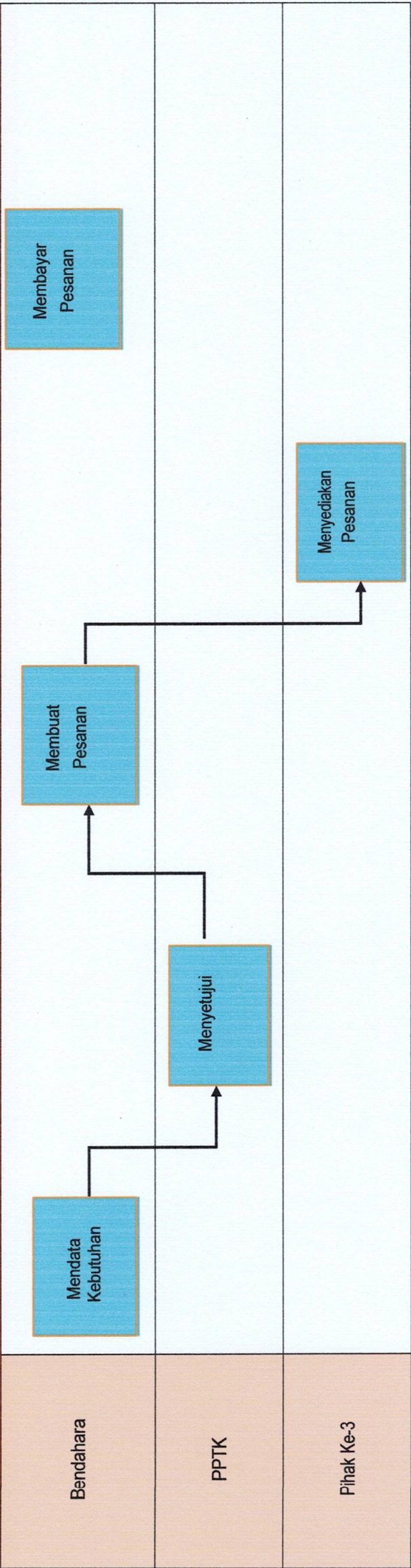
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
BAKESBANGPOL-



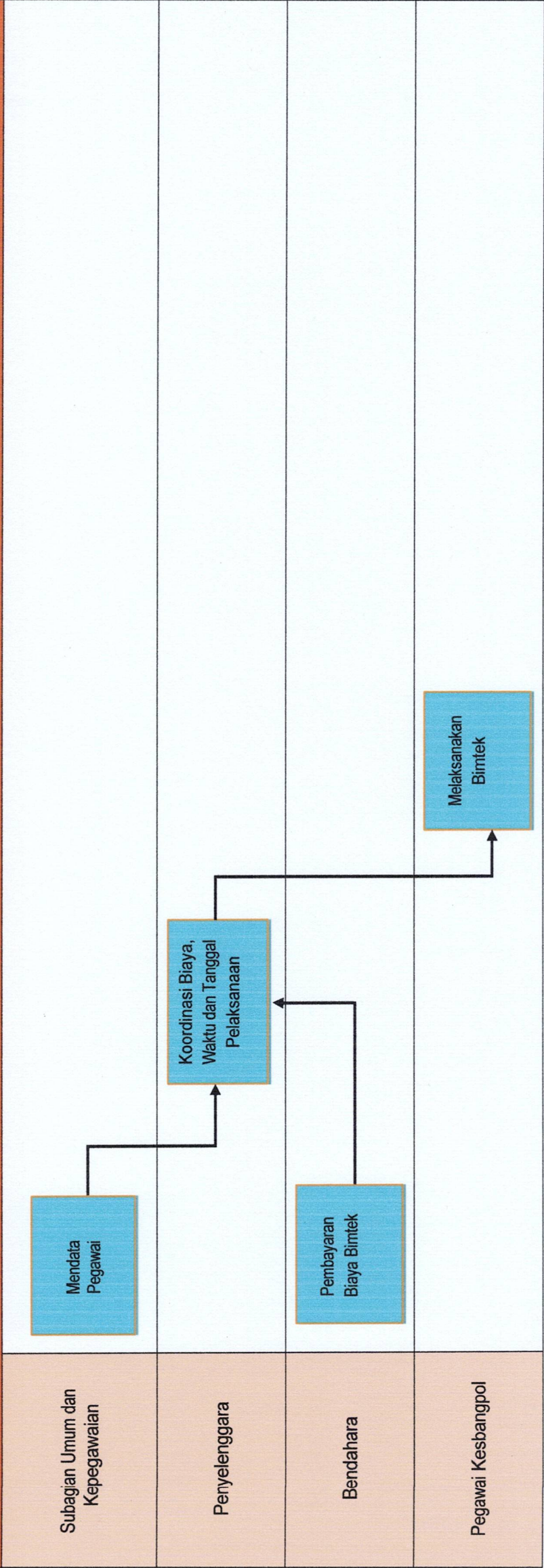
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KPD
BAKESBANGPOL-

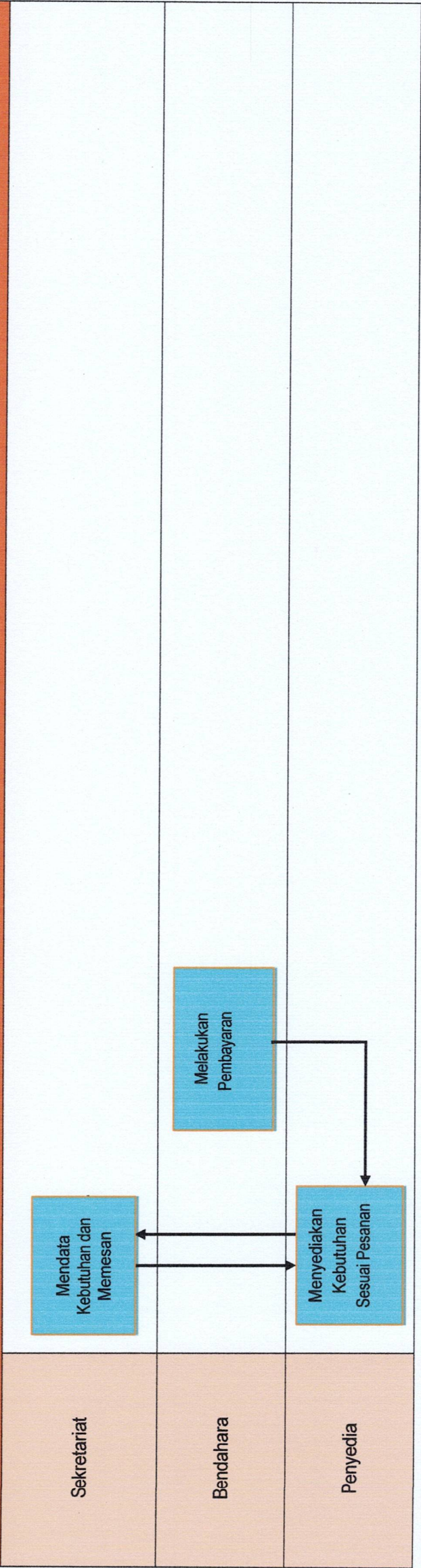


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
BAKESBANGPOL-

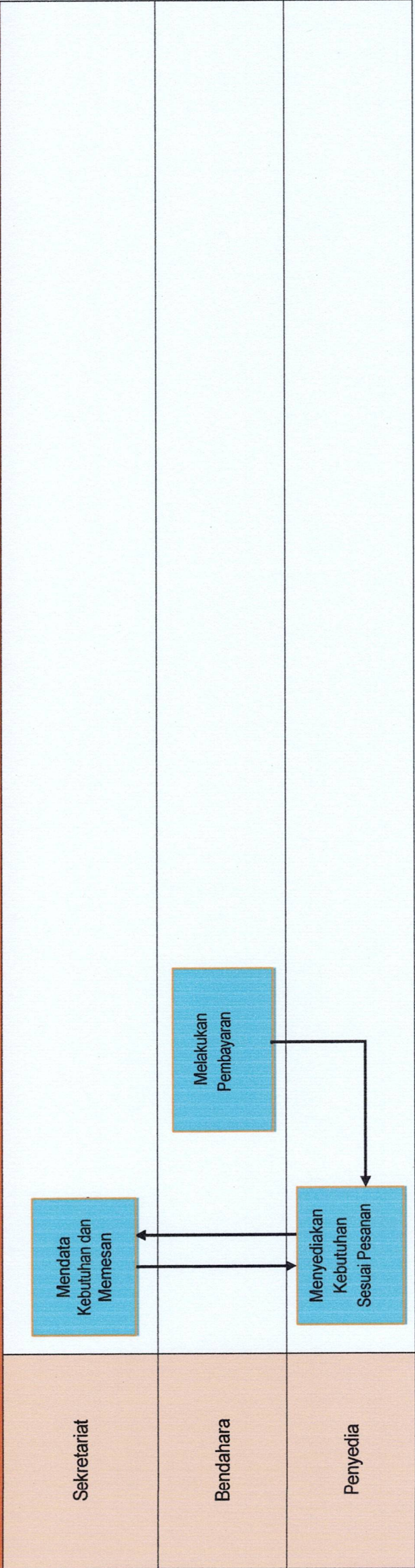


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
BAKESBANGPOL-

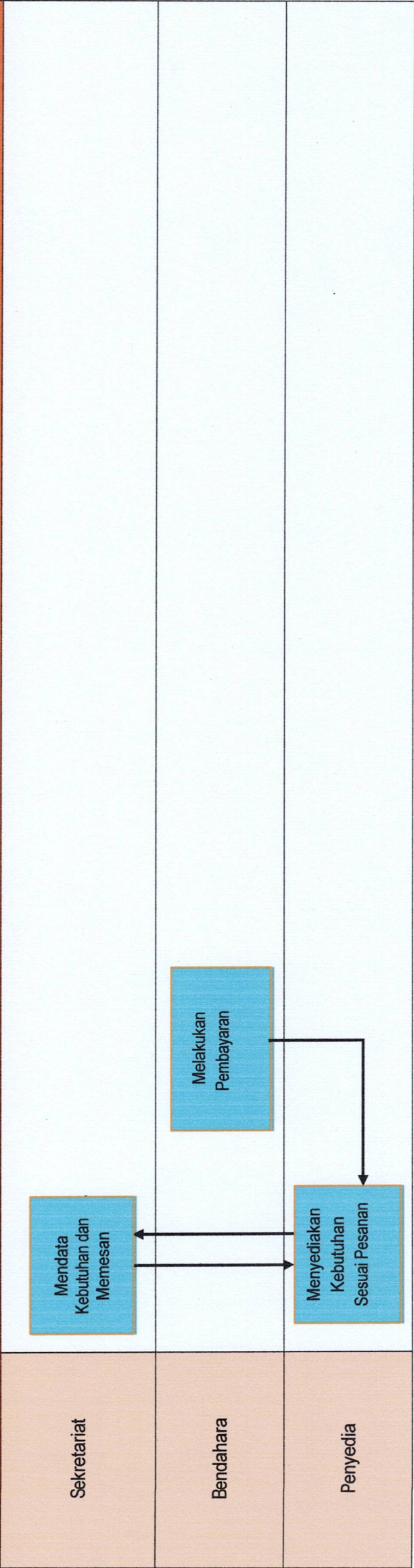




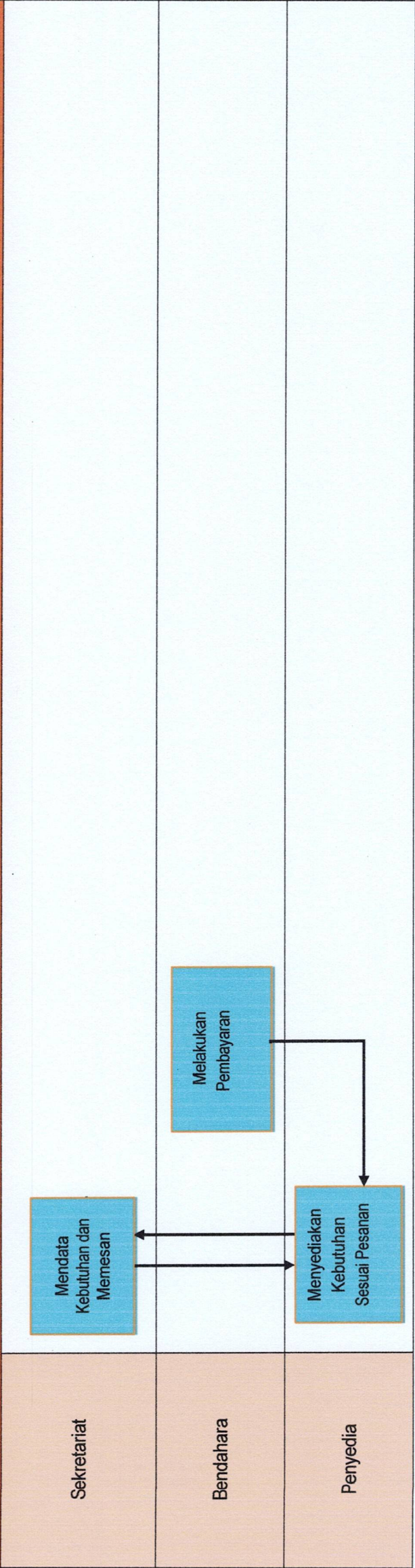
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan... Kantor
BAKESBANGPOL-



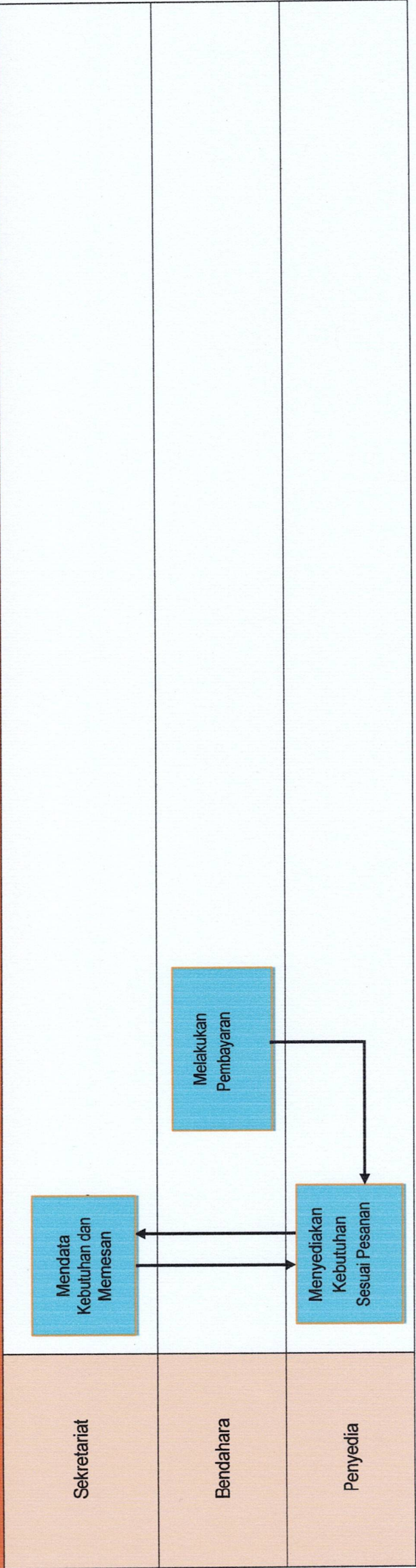
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
BAKESBANGPOL-

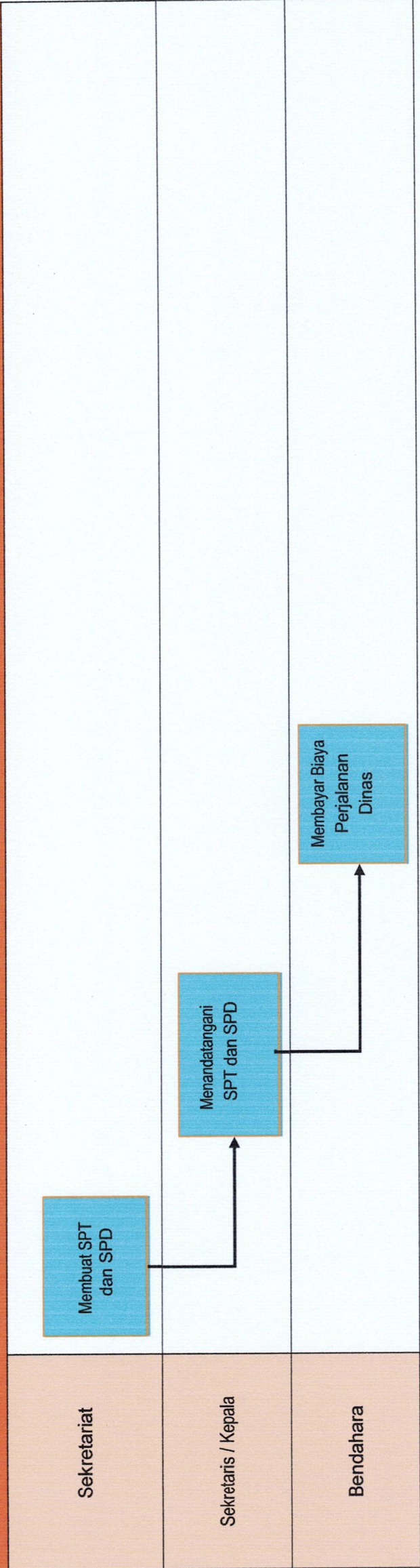


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BAKESBANGPOL-

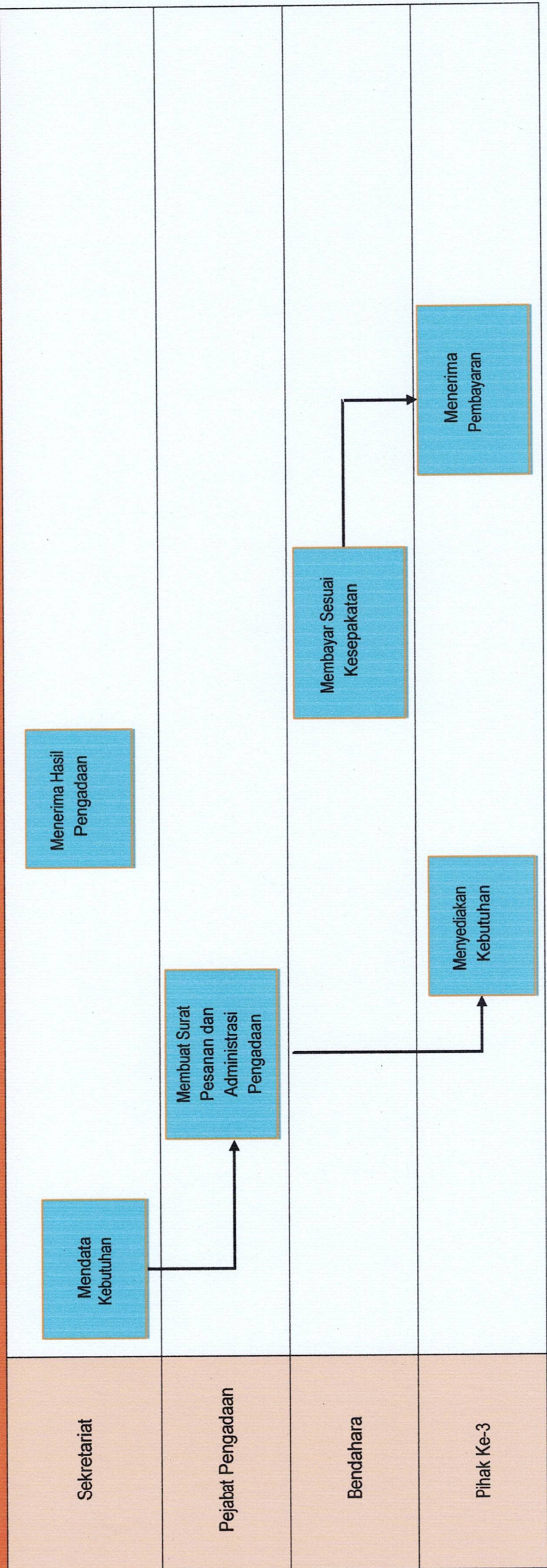


Fasilitasi Kunjungan Tamu
BAKESBANGPOL-

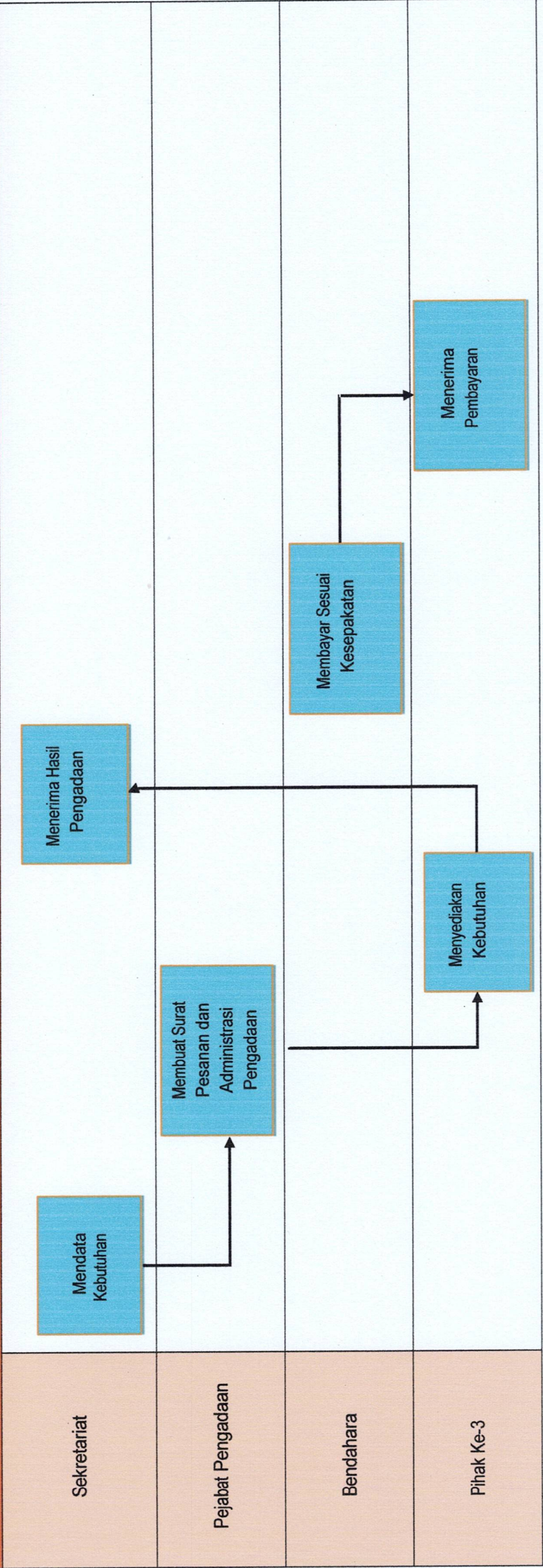




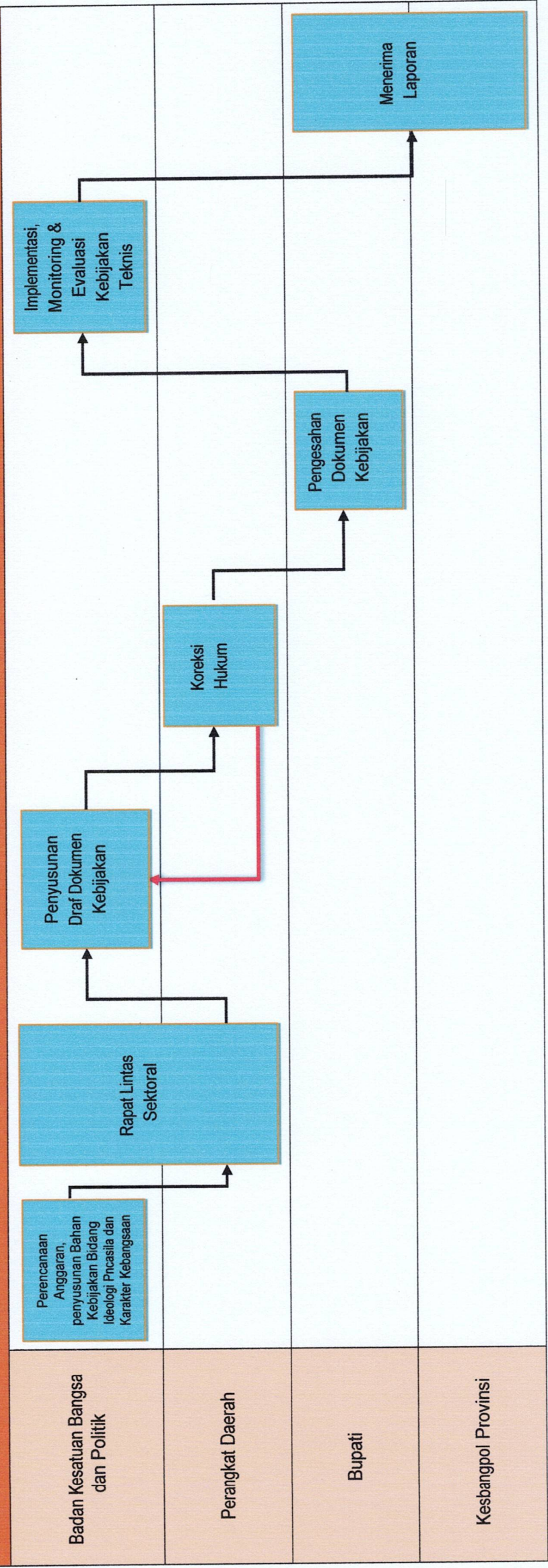
Pengadaan Mebel
BAKESBANGPOL-



Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
BAKESBANGPOL-

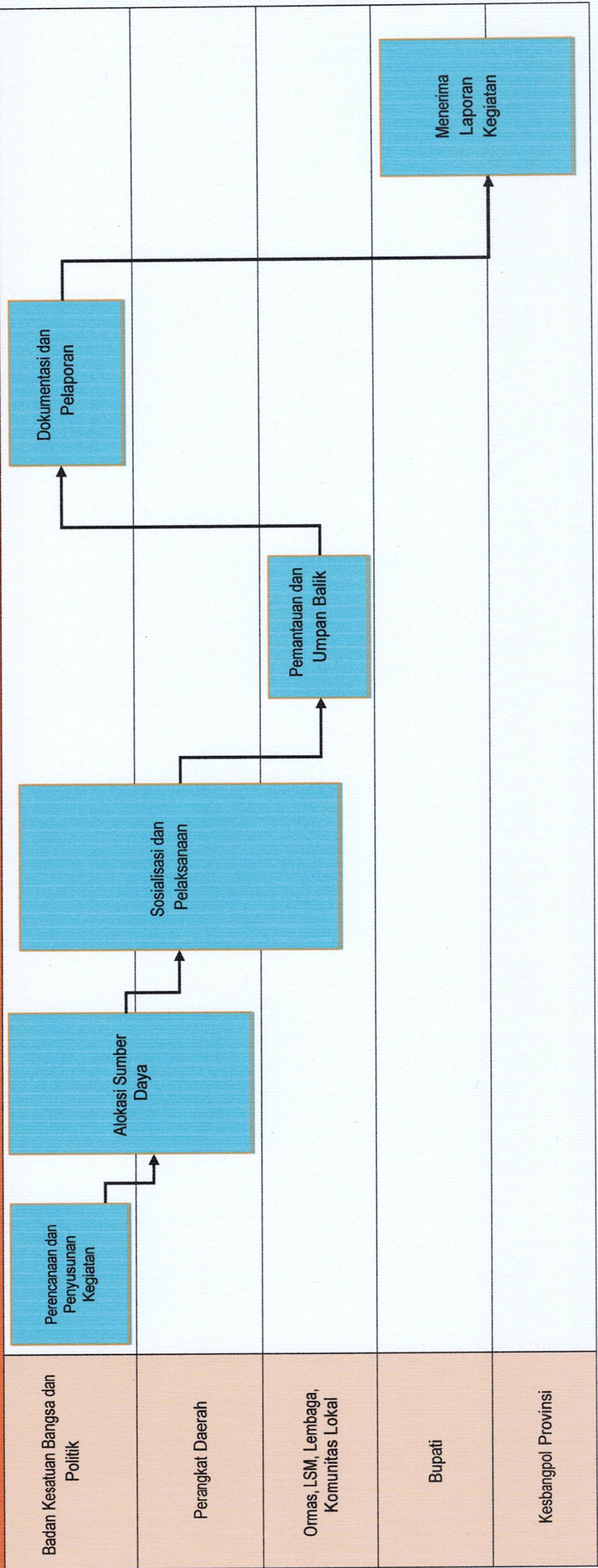


Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan yang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
BAKESBANGPOL-



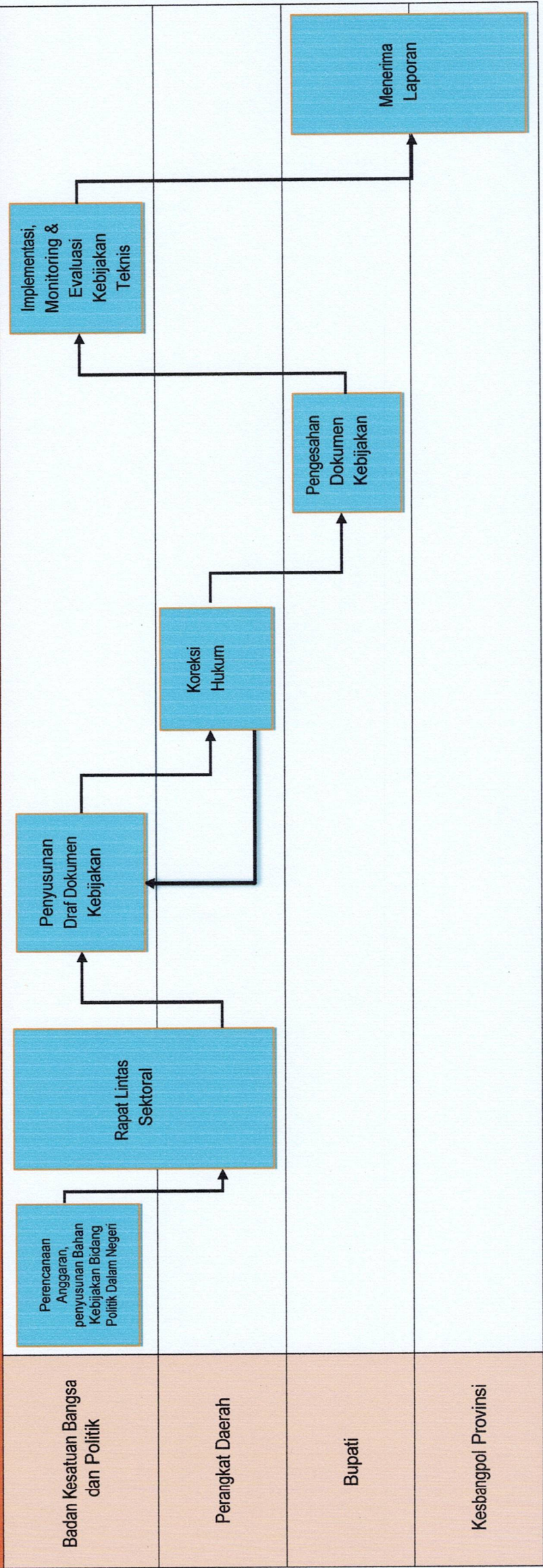
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

BAKESBANGPOL-



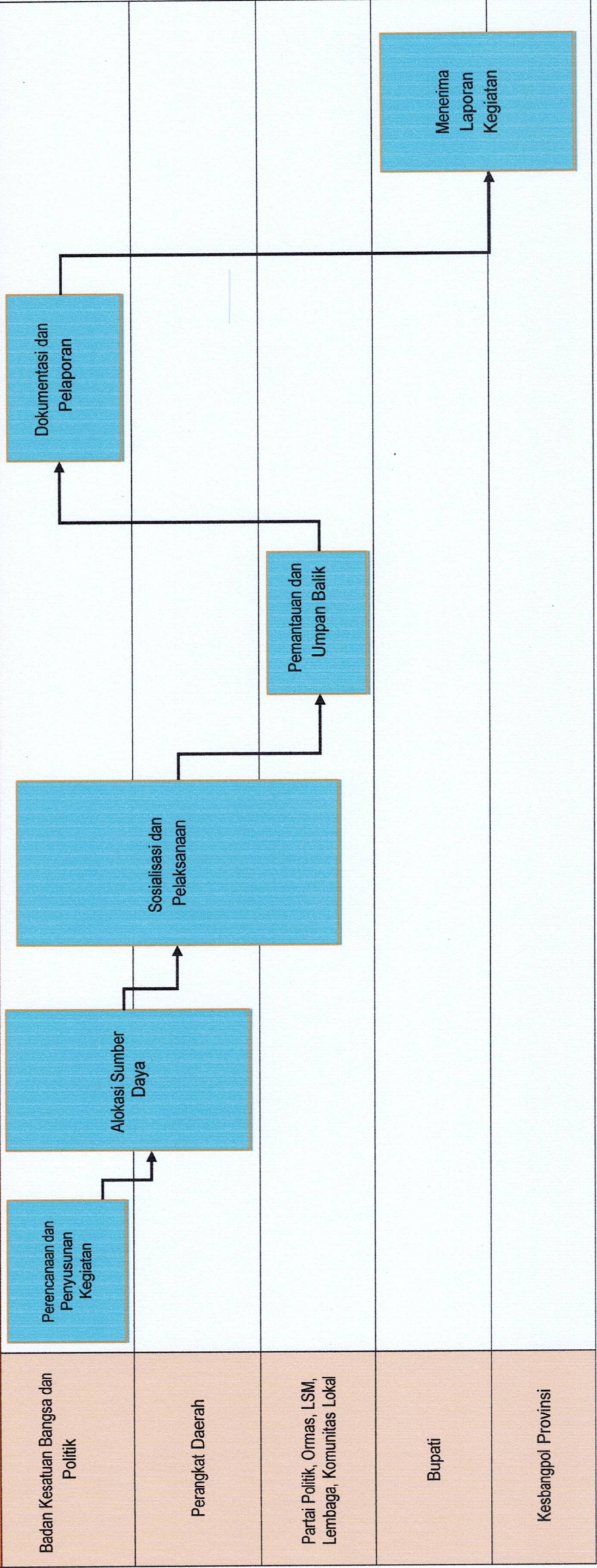
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Undang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

BAKESBANGPOL-



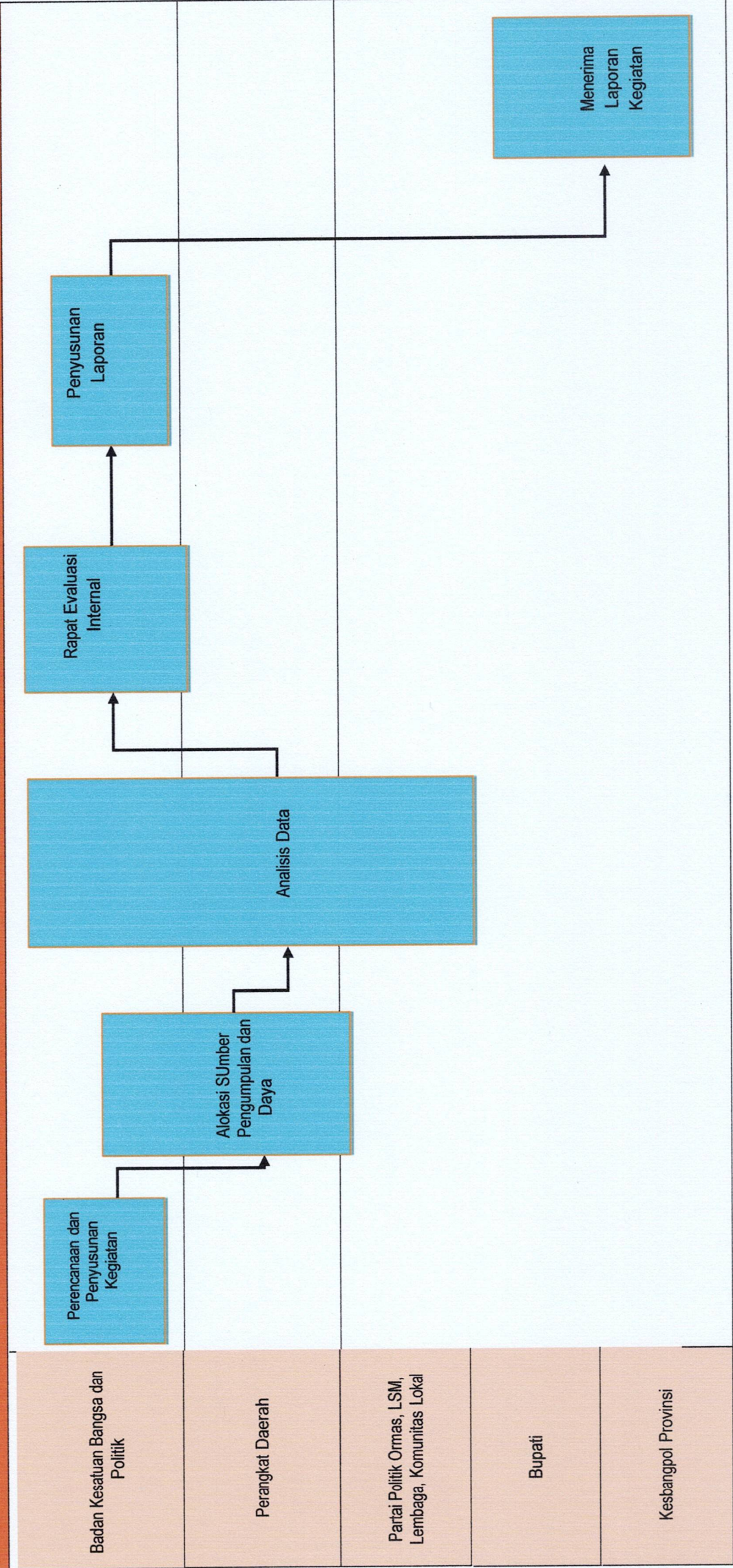
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Burekrasi Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

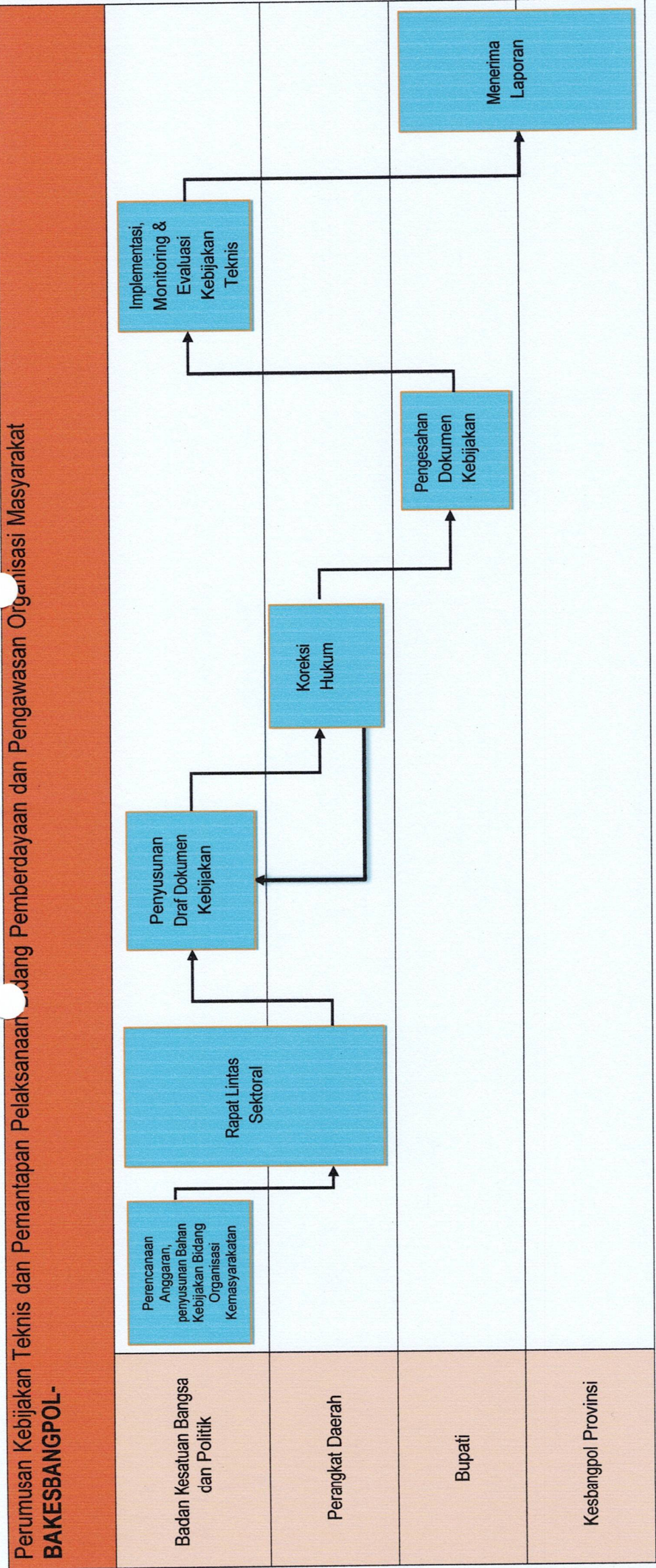
BAKESBANGPOL-



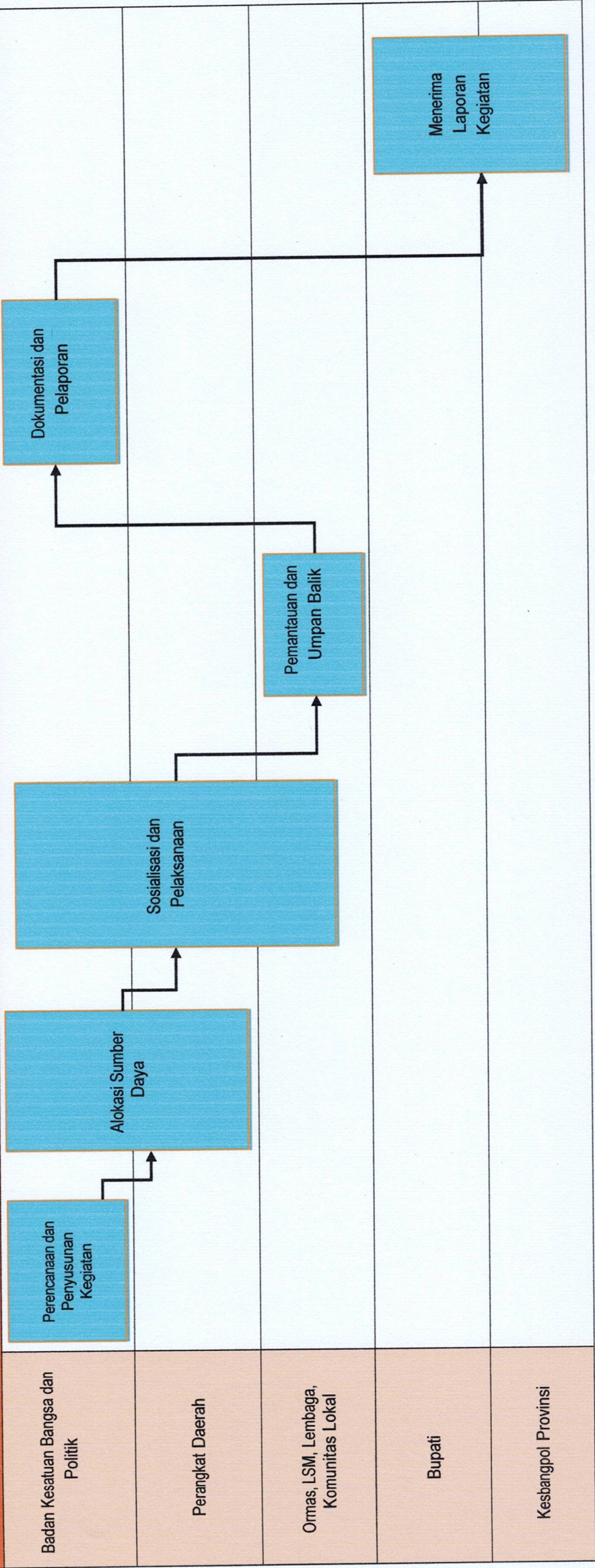
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

BAKESBANGPOL-

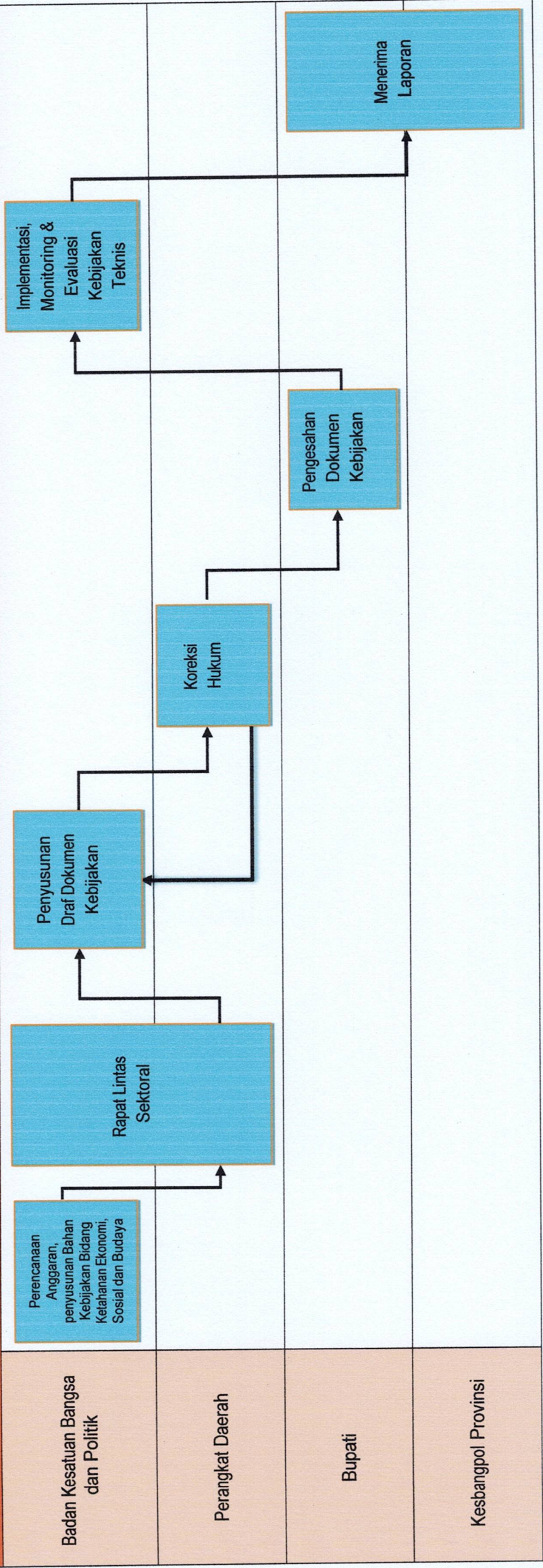




Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
BAKESBANGPOL-

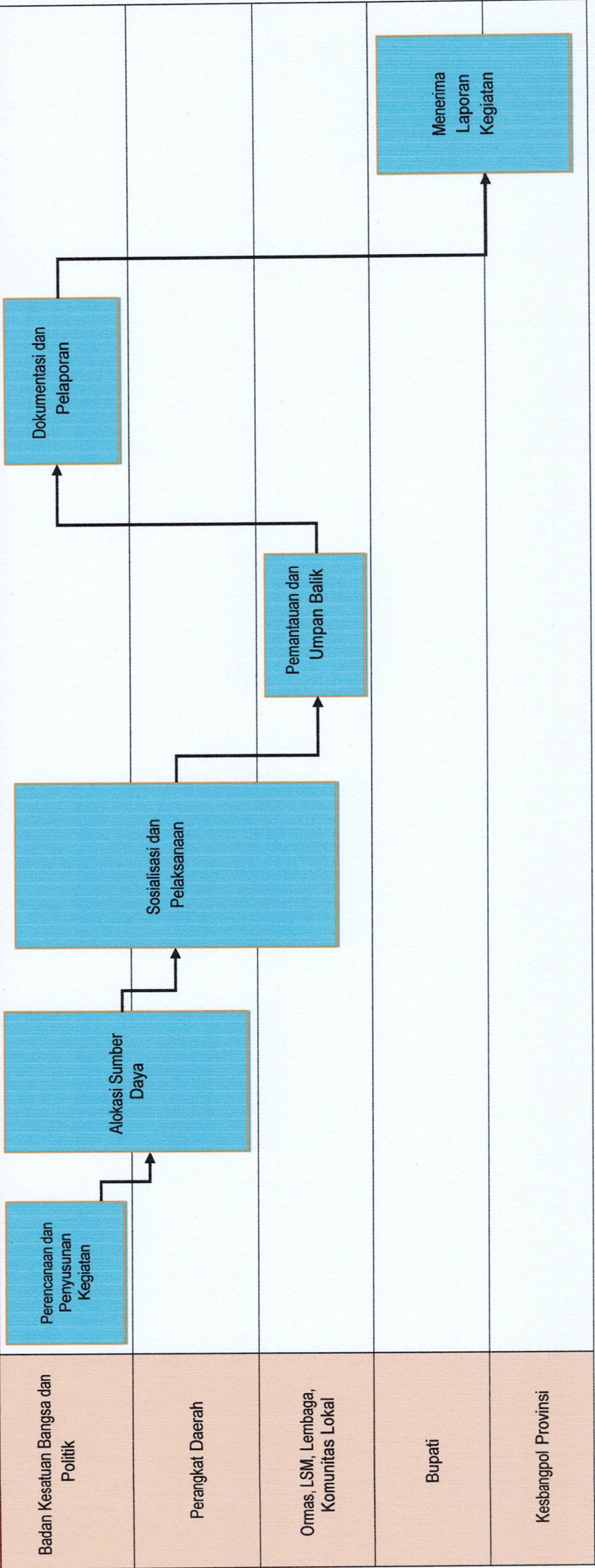


Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
BAKESBANGPOL-



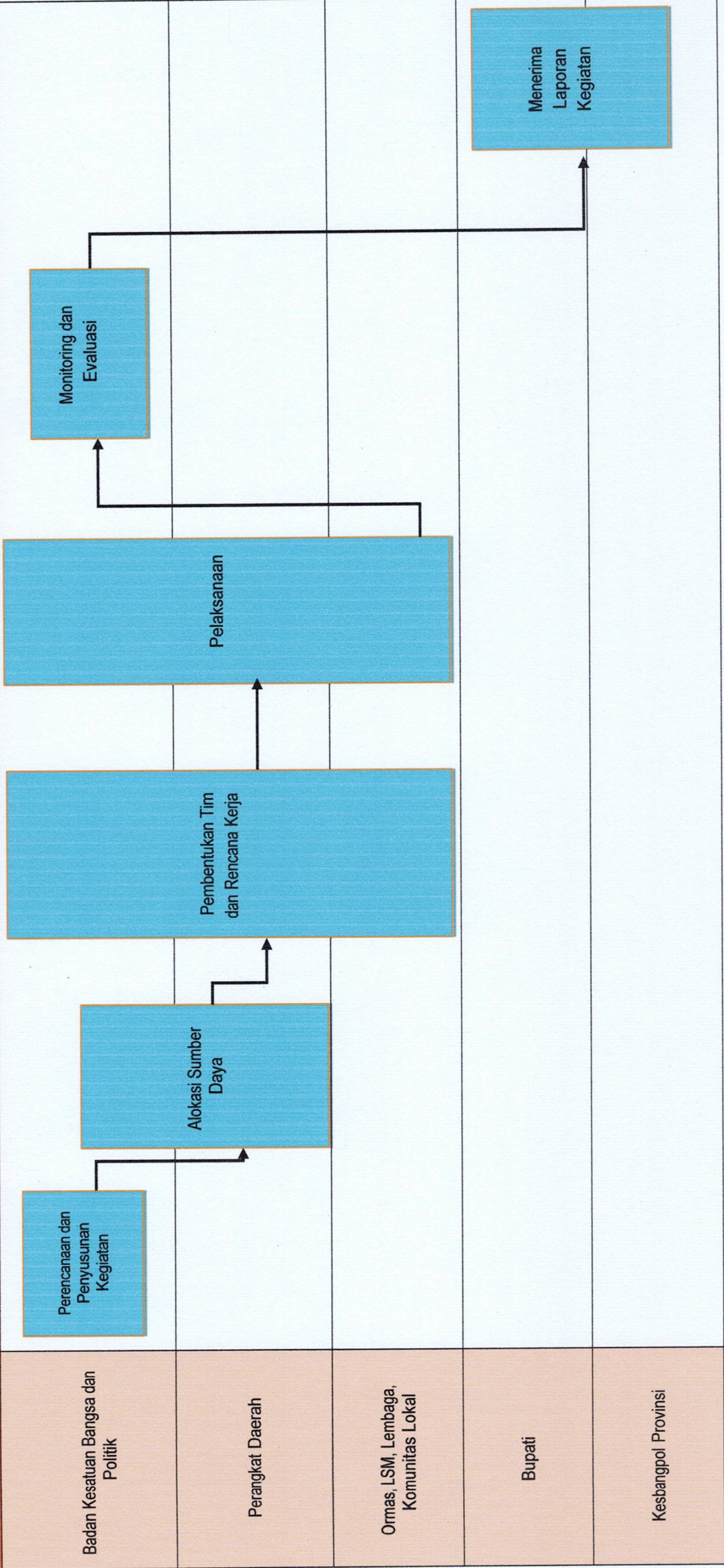
Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

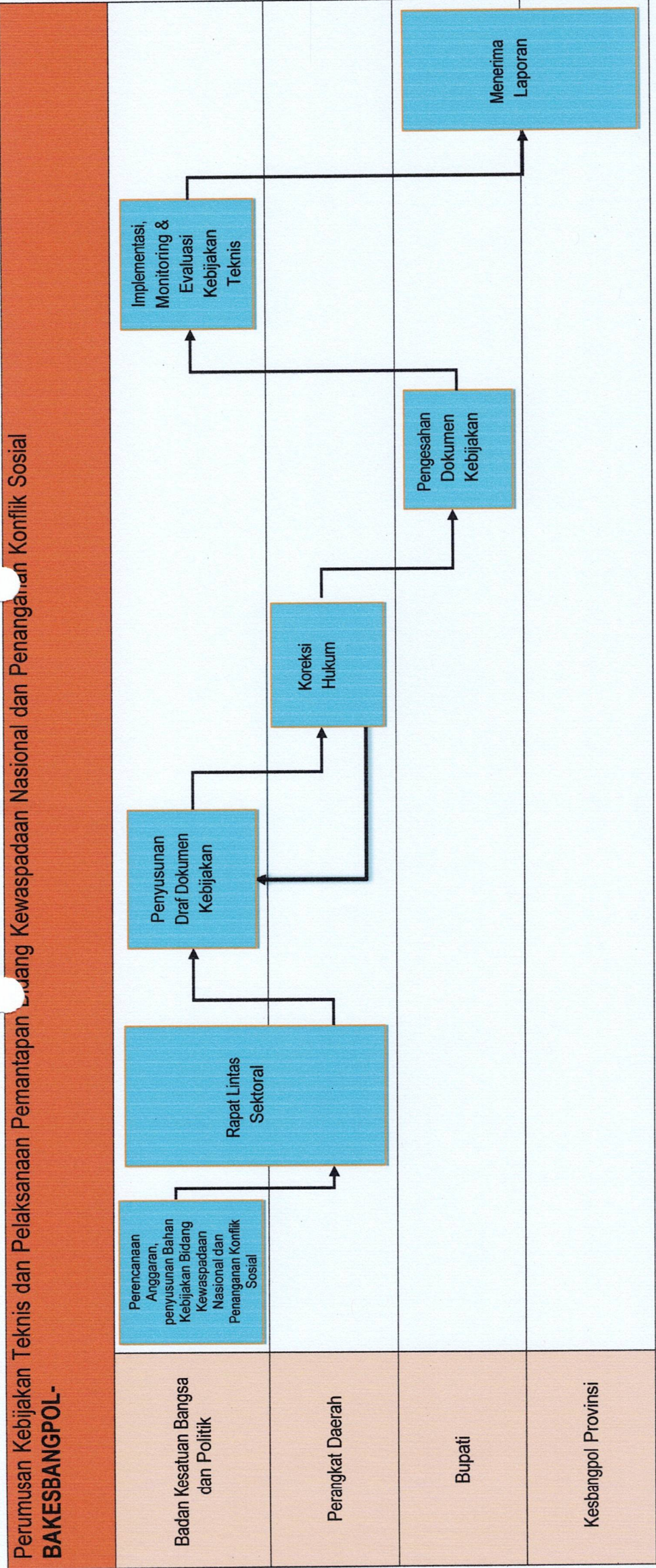
BAKESBANGPOL-



Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

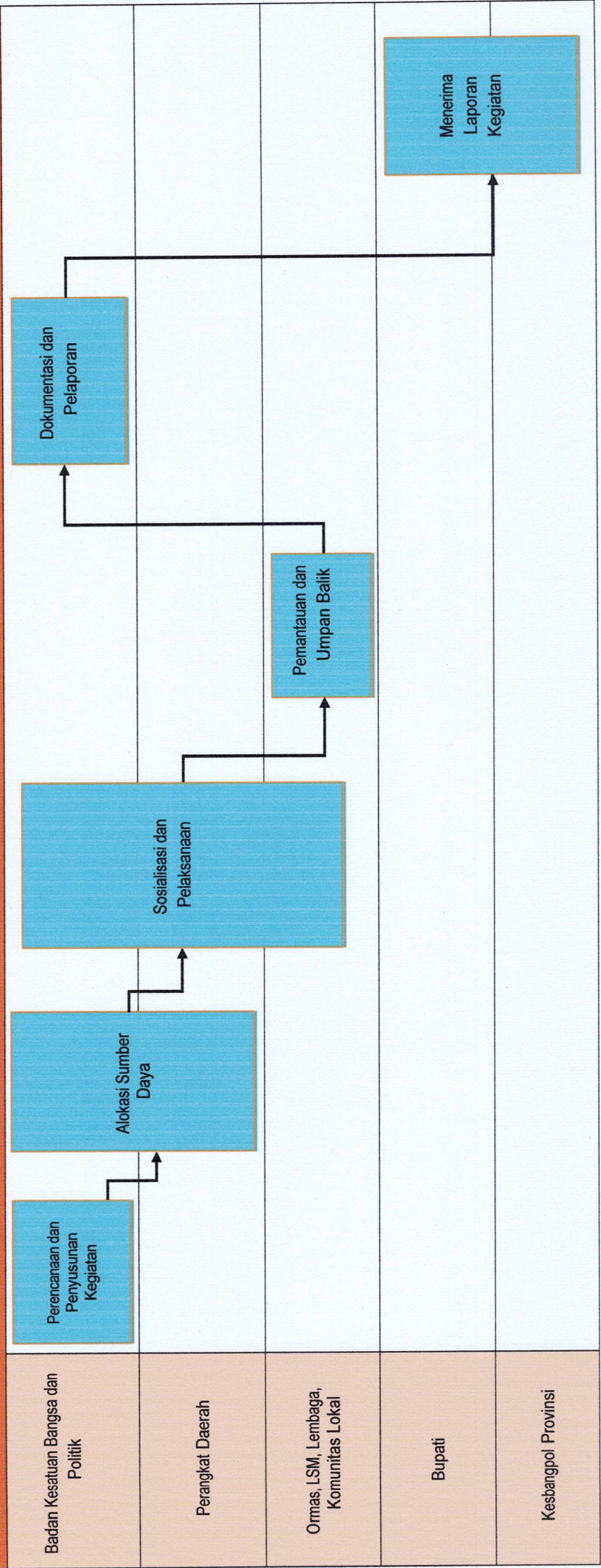
BAKESBANGPOL-





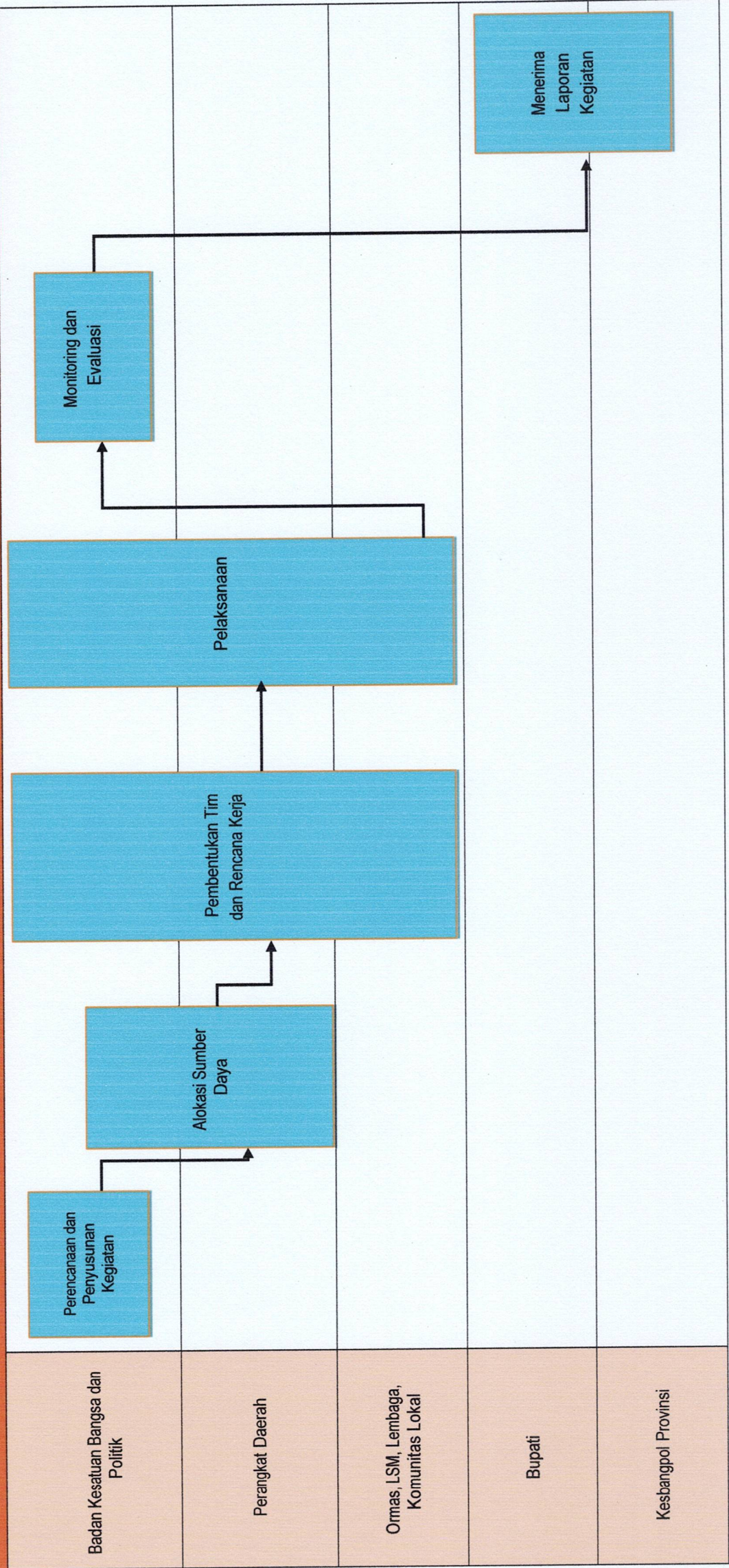
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik daerah

BAKESBANGPOL-



Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pebratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik daerah

BAKESBANGPOL-



Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik daerah

BAKESBANGPOL-

